

Bupati H Muh Adios Buka Jalan Kerja Sama Buton Selatan dengan Pemerintah Korea Selatan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mulai membuka jalur kerja sama internasional dengan Pemerintah Korea Selatan melalui sektor pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kemitraan itu diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Busel.

Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Buton

Selatan H. Muhammad Adios bersama perwakilan Pemerintah Korea Selatan di Aula Kantor Bupati Buton Selatan, Senin (31/8/2026). Pertemuan menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan kedua pihak.

Sejumlah program menjadi fokus pembahasan, mulai dari bantuan sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa, peningkatan kompetensi guru, hingga pengembangan pendidikan voka-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Apresiasi Warga Kombeli Pertahankan Tradisi Mataano Santa



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pesta Adat Mataano Santa kembali digelar masyarakat Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selama lima hari pada 29-31 Agustus dan 1-2 September 2026. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., menghadiri kegiatan

Lanjut ke Hal: 7

Buton Selatan Promosikan Warisan Budaya di Karnaval JKPI XII Kota Ternate

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Kabupaten Buton Selatan membawa identitas budaya daerah ke panggung nasional melalui Karnaval Budaya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (29/8/2026) malam. Delegasi Busel tampil mengenakan busana adat dan pakaian bernuansa budaya daerah.



Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakernas XII JKPI yang berlangsung pada 26-30 Agustus 2026. Dalam karnaval yang

diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah anggota JKPI itu, delegasi Buton Selatan berada pada urutan ke-9, setelah delegasi Kota Baubau.

Karnaval dimulai dari kawasan belakang Benteng Oranje dan berakhir di depan

Lanjut ke Hal: 7

BAUBAU PERCEPAT LAYANAN PUBLIK

LIMA PROGRAM ATR/BPN TUNTAS, PEMKOT BAUBAU TEKEN MoU ATR/BPN, DATA PERTANAHAN TERHUBUNG DENGAN PAJAK DAERAH

Pemkot Baubau dan Kantor ATR/BPN Kota Baubau menandatangani MoU dan PKS tentang pelayanan publik di bidang pertanahan serta integrasi NIB, NOP, dan pemanfaatan ZNT.

Kamis, 27 Agustus 2026 di Ruang Kerja Wali Kota Baubau



POIN-POIN KERJA SAMA



Integrasi NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dan NOP (Nomor Objek Pajak).



Pemanfaatan ZNT (Zona Nilai Tanah) sebagai dasar NPOP BPHTB.



Mempercepat dan menyederhanakan pelayanan pertanahan dan perpajakan.



Meningkatkan akurasi data dan optimalisasi pendapatan daerah.



Pengembangan sistem M-PAD yang terintegrasi dan efisien.



PROGRES BAUBAU Kota Baubau menjadi daerah PERTAMA di Sulawesi Tenggara yang menuntaskan 5 dari 9 program kerja ATR/BPN.



DASAR PROGRAM Tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pertemuan kepala daerah se-Indonesia, Mei 2026.



TUJUAN AKHIR: LAYANAN PUBLIK TERPADU, CEPAT, MUDAH, DAN TRANSPARAN

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mempercepat pembenahan layanan pertanahan dan perpajakan daerah dengan mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta memanfaatkan Zona Nilai Tanah (ZNT). Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan MoU dan PKS antara Pemkot Baubau dan Kantor ATR/BPN Kota Baubau di Ruang Kerja Wali Kota Baubau, Kamis (27/8/2026).

Kerja sama ditandatangani Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE dan Kepala ATR/BPN Kota Baubau Yusuf, S.SiT, disaksikan Sekretaris Daerah Kota Baubau serta organisasi perangkat daerah terkait. Integrasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat

Lanjut ke Hal: 7

Dapat Dana Revitalisasi Rp 946 Juta dari Kemendikdasmen, SDN 1 Masiri Buton Selatan Rehab 7 RKB dan Perpustakaan Plus Bangun WC Baru



Kepsek SDN 1 Masiri Buton Selatan Jalaluddin berada di lokasi sekolah

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Proses belajar mengajar di SDN 1 Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, harus berlangsung dalam tiga shift setelah sebagian besar ruang kelas direhabilitasi melalui program revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sekolah menerima bantuan senilai Rp946.234.000

untuk memperbaiki fasilitas yang sebelumnya mengalami kerusakan berat.

Dari total 12 rombongan belajar (rombel), sekolah hanya dapat menggunakan empat ruangan yang masih layak selama pekerjaan berlangsung. Kondisi itu membuat siswa kelas I dan II mengikuti pembelajaran hingga pukul 10.00, disusul kelas III dan V sampai pukul 13.00, kemudian ke-

las IV dan VI belajar hingga sekitar pukul 17.30.

Kepala SDN 1 Masiri, Jalaluddin, S.Pd., mengatakan pola tiga shift tersebut merupakan hasil kesepakatan dewan guru dan telah disampaikan kepada orang tua siswa. Sistem itu diberlakukan sementara karena kegiatan rehabilitasi menyentuh sejumlah ruang utama sekolah.

Lanjut ke Hal: 7

Lima Program ATR/BPN Tuntas, Pemkot Baubau Teken MoU ATR/BPN, Data Pertanahan Terhubung dengan Pajak Daerah

pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan.

Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I Bapenda Kota Baubau Fauziah, SP., M.Si., mengatakan dua dari sembilan program kerja kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah berkaitan langsung dengan Bapenda, yakni integrasi NIB-NOP dan pemanfaatan ZNT sebagai dasar Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Dari sembilan program kerja tersebut, ada dua yang menjadi program kerja Bapenda, yaitu integrasi NIB atau Nomor Identifikasi Bidang dengan NOP atau Nomor Objek Pajak serta pemanfaatan ZNT sebagai dasar NPOP BPHTB,” ujarnya.

Baubau telah mencatat kemajuan dalam agenda tersebut. Fauziah menyebut Kota Baubau menjadi daerah pertama di Sulawesi Tenggara yang menuntaskan lima dari sembilan program kerja ATR/BPN. Program itu juga merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pertemuan kepala daerah, mulai gubernur, bupati hingga wali kota se-Indonesia pada Mei 2026.

Namun, persiapan integrasi di Baubau tidak baru dimulai setelah arahan tersebut. Sejak Februari 2026, Bapenda telah menginisiasi perencanaan pengembangan sistem

M-PAD untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah. Pemkot kemudian mempercepat PKS karena ATR/BPN telah menyediakan template dan contoh implementasi, termasuk sistem yang digunakan Bapenda Tangerang Selatan.

Pilihan pengembangan M-PAD juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Menurut Fauziah, sistem seperti yang diterapkan Tangerang Selatan membutuhkan anggaran cukup besar, sementara pemerintah daerah sedang menjalankan efisiensi. “Kehadiran M-PAD menjadi salah satu solusi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah karena dapat dibangun dan dikembangkan dengan kebutuhan anggaran yang lebih efisien,” katanya.

Secara historis, integrasi data pertanahan dan perpajakan sejalan dengan perkembangan administrasi pertanahan modern yang semakin mengandalkan data digital dan sistem informasi geospasial. Di Indonesia, kebutuhan menghubungkan data tanah dengan perpajakan semakin penting setelah pengelolaan BPHTB menjadi bagian dari desentralisasi fiskal daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara global, digitalisasi kadaster dan pertukaran data pertanahan juga berkembang untuk meningkatkan kepastian hak atas tanah, efisiensi administrasi, dan transparansi transaksi properti.

Bagi masyarakat, integrasi tersebut diharapkan memangkas proses yang selama ini dilakukan secara terpisah antara Kantor Pertanahan dan pelayanan pajak. “Dengan adanya integrasi melalui M-PAD, data Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak dapat tersinkronisasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan sederhana,” kata Fauziah.

Melalui MoU dan PKS tersebut, Pemkot Baubau dan ATR/BPN tidak hanya menargetkan penyederhanaan pelayanan, tetapi juga membangun basis data yang lebih terpadu untuk mendukung akurasi perpajakan daerah. Sinkronisasi NIB, NOP, dan pemanfaatan ZNT diharapkan menjadi fondasi bagi pelayanan pertanahan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pendapatan daerah. (*)

Bupati H Muh Adios Buka Jalan Kerja Sama Buton Selatan dengan Pemerintah Korea Selatan

si. Pemerintah Busel juga melihat peluang penguatan keterampilan pemuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM daerah. Ruang kolaborasi tidak hanya diarahkan pada pendidikan. Pertukaran seni dan budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya turut dibahas sebagai instrumen untuk memperkenalkan kekayaan budaya Buton Selatan ke lingkungan internasional sekaligus memperluas jejaring daerah.

Bupati Muhammad Adios menilai pendidikan dan kebudayaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pendidikan menentukan kualitas generasi mendatang, sedangkan kebudayaan menjadi identitas yang dapat memperkuat posisi daerah dalam hubungan dengan dunia luar.

“Budaya adalah identitas kita, dan pendidikan adalah kunci masa depan kita,” ujar Adios.

Gagasan tersebut juga memiliki konteks yang lebih luas. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan telah

berkembang sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 18 September 1973. Dalam perkembangannya, kerja sama kedua negara meluas ke berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan pengembangan SDM. Pengalaman kerja sama tersebut menjadi salah satu konteks yang dapat mendukung penjajakan kemitraan di tingkat daerah.

Bagi Busel, kerja sama internasional di bidang pendidikan dan budaya juga dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan seni, tradisi, serta potensi pariwisata daerah kepada masyarakat dunia. Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut sekaligus membuka kesempatan peningkatan kapasitas guru dan pemuda melalui program yang lebih konkret.

Sebagai tindak lanjut, hasil pertemuan akan menjadi dasar penyusunan nota kesepahaman (MoU). Program lanjutan akan melibatkan perangkat daerah terkait bersama DPRD Buton Selatan sehingga bentuk kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dapat disusun secara terarah dan diterjemahkan ke dalam program konkret. (*)

Dapat Dana Revitalisasi Rp 946 Juta dari Kemendikdasmen, SDN 1 Masiri Buton Selatan Rehab 7 RKB dan Perpustakaan Plus Bangun WC Baru

“Shift pagi itu kelas 1-2, pulang jam 10. Setelah itu masuk kelas 3 dengan kelas 5 pulangnya jam 1. Lalu masuk kelas 4 dan kelas 6 sampai jam setengah 6 sore,” kata Jalaluddin.

Paket revitalisasi tersebut mencakup sembilan item pekerjaan dengan masa pelaksanaan 90 hari. Selain rehabilitasi berat tujuh ruang kelas belajar (RKB) dan satu perpustakaan, proyek itu mencakup pembangunan WC baru dua pintu serta talud atau dinding penahan tanah. Pekerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2025 sehingga kegiatan pembelajaran diharapkan kembali normal pada Januari.

Sebelum mendapat rehabilitasi, sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan pada bagian lantai dan dinding. Beberapa kolom atau tiang juga telah keropos. Perbaikan meliputi atap, plafon, lantai, tiang, dinding, serta kusen dan kaca yang mengalami kerusakan.

“Jadi itu semua diperbaiki nanti. Dari atap, plafon, lantai, termasuk tiang-tiang yang sudah keropos dan dinding yang retak. Kusen tidak diganti semua, hanya yang rusak saja termasuk kacanya,” ujarnya.

Bantuan tersebut diperoleh setelah sekolah mengusulkan kondisi kerusakan melalui aplika-

si Dapodik sejak Juni tahun sebelumnya. Pihak sekolah mengunggah dokumentasi kerusakan bangunan mulai dari kategori ringan hingga berat untuk menjadi bahan verifikasi kementerian. Menurut Jalaluddin, kerusakan yang disetujui untuk program tersebut merupakan bagian yang masuk kategori berat.

“Yang kami upload kerusakan dari ringan sampai berat. Jadi yang disetujui ini yang kategori kerusakan berat semua,” katanya. Ia menjelaskan, sekolah juga harus mengisi tingkat kerusakan secara proporsional karena tingkat kerusakan sekitar 90 persen dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pembangunan baru, bukan rehabilitasi.

Program revitalisasi satuan pendidikan sendiri menjadi bagian dari kebijakan Kemendikdasmen pada 2025. Pemerintah saat itu menempatkan revitalisasi sekolah sebagai salah satu fondasi untuk membangun ekosistem pembelajaran yang bermutu. Pada Oktober 2025, sasaran program secara nasional bahkan tercatat meningkat dari target awal 10.440 menjadi 16.139 satuan pendidikan.

Kebutuhan memperbaiki fasilitas sekolah juga menjadi persoalan global. UNESCO melalui kerangka SDG 4 menempatkan pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan yang aman, inklusif, serta layak sebagai bagian penting dari agenda pendidikan. Laporan UNESCO 2026 mencatat fasilitas dasar masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk akses air minum dan sarana cuci tangan di sekolah dasar. (*)

dilakukan melalui perlindungan terhadap peninggalan fisik, tetapi juga dengan menghadirkan identitas budaya dalam ruang publik dan forum kebudayaan antar-daerah.

Secara historis, gagasan pelestarian kota dan kawasan pusaka di Indonesia berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan warisan budaya dan sejarah perkotaan. JKPI kemudian menjadi wadah pemerintah daerah untuk membangun jejaring dalam pelestarian serta pengembangan kota pusaka. Di tingkat internasional, upaya serupa mendapat perhatian melalui UNESCO yang sejak 1972 mendorong negara-negara melindungi warisan budaya dan alam dunia melalui Konvensi Warisan Dunia.

Rakernas XII JKPI di Ternate mempertemukan pemerintah daerah anggota jaringan tersebut untuk memperkuat komitmen bersama terhadap pelestarian dan pengembangan kota pusaka serta kebudayaan Indonesia. Kehadiran berbagai delegasi sekaligus menunjukkan bahwa warisan budaya dapat menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan antardaerah.

Bagi Buton Selatan, momentum di Ternate membuka ruang promosi yang lebih luas. Selain memperkenalkan busana dan identitas budaya daerah, keikutsertaan itu menjadi upaya memperkuat posisi kebudayaan sebagai bagian dari potensi daerah yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan diperkenalkan kepada publik nasional. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Apresiasi Warga Kombeli Pertahankan Tradisi Mataano Santa

Baruga Kelurahan Kombeli, Sabtu (29/8/2026), sekaligus mendorong pelestarian tradisi sebagai bagian dari penguatan persatuan masyarakat.

Mataano Santa menjadi ruang bagi warga untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil bumi, keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang diterima masyarakat. Ketua Panitia Rafiudin, S.Ag., mengatakan kegiatan tersebut juga berfungsi mempererat silaturahmi, menjaga persatuan dan keamanan, serta menggerakkan ekonomi lokal. Generasi muda dilibatkan melalui kerja bakti dan kegiatan kebersihan lingkungan.

Rangkaian pesta adat itu memuat sejumlah prosesi, antara lain Pikuciapa dan Pidaoa’a. Pikuciapa merupakan ritual menaburkan hasil bumi, seperti ketupat atau kauru, ikan, ubi, nanas, pisang, dan hasil bumi lainnya ke empat penjuru mata angin, disertai doa agar warga Kombeli, termasuk mereka yang berada di perantauan hingga luar negeri, memperoleh rezeki, keselamatan, dan perlindungan Allah SWT.

Adapun Pidaoa’a merepresentasikan tradisi pertukaran atau barter masyarakat Kombeli pada masa lalu. Hasil kebun, seperti ubi dan beras, ditukar dengan kebutuhan lain, antara lain ikan, garam, atau pakaian. Dalam pesta adat, tradisi tersebut kembali diperagakan melalui pertukaran antarpengurus adat sebagai simbol kebersamaan, persaudaraan, dan semangat berbagi.

Bupati Alvin mengapresiasi masyarakat dan panitia yang tetap menyelenggarakan Mataano Santa di tengah efisiensi anggaran. Ia menilai keberlanjutan pesta adat tersebut menunjukkan kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan leluhur. “Ini salah satu pesta adat yang luar biasa yang pernah saya lihat. Saya berharap kita semua diberikan kesehatan agar tahun depan kita bisa mengikuti acara adat Mataano Santa lagi,” kata Alvin.

Ia juga meminta pemerintah kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan adat di Kombeli. Pemerintah daerah, kata dia, terbuka terhadap masukan masyarakat dan akan melihat kebutuhan tersebut secara bersama-sama agar pelaksanaan tradisi dapat terus berlangsung.

Secara historis, keberadaan tradisi Mataano Santa sejalan dengan kuatnya tradisi masyarakat Buton yang memadukan adat, kehidupan sosial, dan nilai keagamaan. Kajian tentang budaya Buton mencatat bahwa sejumlah tradisi lokal berkembang melalui perjumpaan budaya dengan Islam, sementara tradisi syukur dan ritual komunal tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan, sumber kebudayaan pemerintah mencatat aktivitas masyarakat Buton dalam pelayaran dan perantauan telah berlangsung

tan tersebut bukan sekadar bagian dari parade. Karnaval dimanfaatkan sebagai medium memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas sekaligus memperluas promosi warisan budaya Buton Sela-

tan di tingkat nasional. “Karnaval menjadi ruang perjumpaan budaya antardaerah,” demikian gambaran yang tercermin dari agenda tersebut.

Keikutsertaan Busel juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan warisan budaya. Pesta tersebut

Prabowo Buka Jalan bagi Dayak Pedalaman Masuk TNI, Syarat Fisik Disesuaikan



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Pemerintah membuka ruang penyesuaian persyaratan bagi masyarakat Suku Dayak pedalaman yang hendak mengikuti rekrutmen prajurit TNI. Kebijakan itu mencakup karakteristik fisik tertentu dan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah dalam tubuh TNI.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeudin mengonfirmasi adanya keistimewaan atau privilege bagi calon prajurit dari Dayak pedalaman yang tidak memenuhi standar fisik tertentu. Pernyataan itu disampaikan Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8), saat menjelaskan hasil pembahasan bersama Presiden.

“Oh ya, suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kasih sedikit privilege lah,” ujar Sjafrie.

Pembahasan mengenai kebijakan tersebut berawal dari pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Besar Pasukan Merah Tiaru Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jiliah, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8). Dalam pertemuan itu, aspirasi masyarakat Dayak untuk memperoleh kesempatan menjadi anggota TNI dan Polri turut disampaikan kepada Presiden.

Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya menyebut Prabowo memberikan sejumlah instruksi untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Salah satu poinnya ialah penyesuaian persyaratan bagi masyarakat adat yang hendak menjadi anggota TNI dan Polri, termasuk mengenai penggunaan tato yang merupakan bagian dari tradisi adat.

Arahan tersebut kemudian dibahas lebih lanjut sehari setelah pertemuan Prabowo

dengan Panglima Jiliah. Pada Sabtu (29/8), Presiden memanggil Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor.

Dalam pertemuan di Hambalang itu, perkembangan mengenai penyesuaian syarat perekrutan Suku Dayak pedalaman menjadi salah satu agenda. Selain itu, Presiden meminta laporan mengenai penanganan sejumlah bencana, antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kalimantan dan Sumatra.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan kebijakan mengenai tato adat sebenarnya bukan hal baru dalam rekrutmen TNI. Menurut dia, masyarakat yang memiliki tato karena tradisi adat telah diperbolehkan mengikuti proses penerimaan prajurit sejak sebelumnya.

“Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8).

Ketentuan rekrutmen TNI AD 2026 sendiri masih mencantumkan persyaratan umum mengenai kondisi fisik calon prajurit. Dalam penerimaan Tamtama PK TNI AD, misalnya, tinggi badan minimal yang tercantum ialah 158 sentimeter dengan berat badan seimbang. Untuk tato atau bekas tato, terdapat pengecualian apabila disebabkan ketentuan adat, dengan persyaratan tertentu berupa surat keterangan dari ketua adat atau suku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur adat telah memperoleh ruang dalam sistem penerimaan TNI. Pada penerimaan calon Taruna Akademi TNI 2026, misalnya, aturan juga menyebut larangan tato dengan pengecual-

ian apabila tato tersebut disebabkan ketentuan agama atau adat.

Kebijakan serupa juga memiliki jejak dalam proses rekrutmen TNI AD di masa lalu. Pada penerimaan Bintara PK TNI AD Tahun Anggaran 2015 di wilayah Kodam VI/Mulawarman, terdapat ketentuan khusus bagi putra daerah Dayak yang cukup menekankan kelulusan ujian nasional sebagai salah satu persyaratan pendidikan. Pada periode itu, standar tinggi badan pria tercantum 165 sentimeter.

Maruli mengatakan keterwakilan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia justru penting bagi TNI. Terlebih, menurut dia, institusi tersebut kini tengah melakukan penambahan personel sehingga peluang bagi masyarakat dari berbagai daerah diharapkan semakin terbuka.

“Kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah,” ujar Maruli.

Ia menegaskan TNI ingin memperoleh personel yang berasal dari latar belakang daerah yang beragam. Dengan demikian, rekrutmen tidak hanya dipandang sebagai proses pemenuhan kebutuhan personel, tetapi juga sebagai salah satu cara memastikan representasi masyarakat Indonesia dalam institusi pertahanan negara.

“Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” katanya.

Secara historis, kebutuhan menjaga keterwakilan masyarakat dalam institusi pertahanan berkaitan erat dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman suku dan budaya. TNI sendiri dibentuk pada 5 Oktober 1945, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan,

melalui perkembangan organisasi perjuangan bersenjata yang kemudian menjadi bagian dari proses pembentukan angkatan bersenjata nasional.

Dalam konteks masyarakat adat, keberadaan Suku Dayak juga memiliki sejarah panjang dalam dinamika sosial dan pertahanan di Kalimantan. Karena itu, pembukaan akses yang lebih luas bagi masyarakat Dayak pedalaman untuk menjadi prajurit TNI dapat ditempatkan dalam kerangka memperkuat partisipasi masyarakat dari wilayah dan latar budaya yang beragam.

Fenomena penyesuaian standar militer terhadap karakteristik masyarakat lokal juga bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara dengan masyarakat adat atau kelompok etnis yang memiliki tradisi khas menghadapi tantangan serupa dalam menjaga standar militer sekaligus memastikan kebijakan rekrutmen tidak mengabaikan identitas budaya. Namun, bentuk dan mekanisme pengecualian setiap negara berbeda sesuai hukum serta kebijakan pertahanan masing-masing.

Bagi pemerintah, persoalan utama dalam kebijakan tersebut adalah menemukan titik keseimbangan antara standar profesional prajurit dan karakteristik masyarakat adat. Penyesuaian persyaratan tidak berarti menghilangkan seluruh standar seleksi, sebab calon prajurit tetap harus melewati rangkaian pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan TNI.

Dengan demikian, pembukaan peluang bagi Dayak pedalaman tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan atau tato tradisional. Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas basis rekrutmen TNI sekaligus memastikan masyarakat dari kawasan pedalaman dan kelompok adat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pertahanan negara.

Pemerintah selanjutnya perlu menerjemahkan arahan Presiden tersebut ke dalam mekanisme rekrutmen yang jelas dan terukur. Kejelasan mengenai bentuk privilege, persyaratan yang dapat disesuaikan, serta prosedur pembuktiannya menjadi penting agar kebijakan tetap transparan dan tidak menimbulkan tafsir berbeda dalam pelaksanaan seleksi di lapangan.(*)

Gerindra Tegaskan Tak Ada Paket Istana di Balik Duet Pimpinan Baru PBNU

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah anggapan bahwa terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam merupakan paket yang disiapkan Istana. Menurut Muzani, isu tersebut hanya beredar di ruang publik tanpa bukti yang ia lihat secara langsung.

“Itu berseliweran, tapi saya tidak melihat adanya isu itu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8).

Pernyataan Muzani disampaikan setelah Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), setelah sebelumnya Gus Kikin memperoleh dukungan suara tertinggi dalam penjurian calon ketua umum.

Dalam tahapan penjurian, Gus Kikin mengantongi 472 suara dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Perolehan tersebut menempatkannya di posisi teratas dari lima nama yang memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Lima nama tersebut terdiri atas Gus Kikin, KH Zulfah Mustofa, KH Abdussalam Sohib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin. Setelah proses penjurian, nama-nama tersebut disampaikan kepada Rais Aam terpilih untuk mendapatkan persetujuan sebelum diputuskan melalui musyawarah AHWA.

Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dari perubahan tata cara pemilihan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35. Para mukhtamirin sebelumnya menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum dari model pemungutan suara langsung menjadi penentuan melalui AHWA. Dalam sidang pleno, 401 dari 552 suara atau sekitar 73 persen peserta menyetujui perubahan tersebut.

AHWA yang menentukan kepemimpinan PBNU terdiri atas sembilan kiai. Mereka bermusyawarah secara tertutup di Ndalem Kasepuhan pada Senin pagi, mulai pukul 06.20 WIB hingga 07.00 WIB. Pertemuan tersebut diawali pembacaan Ummul Qur'an dan ditutup dengan doa dari KH Anwar Manshur.

Anggota AHWA kemudian secara mufakat memilih KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Keputusan itu diumumkan KH Anwar Iskandar dalam sidang pleno di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026-2031,” kata Kiai Anwar saat membacakan keputusan AHWA.

Berita acara penetapan tersebut kemudian ditandatangani sembilan anggota AHWA, yakni KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga terpilih sebagai Rais Aam, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin.

Terpilihnya Gus Kikin bersama Miftachul Akhyar menandai dimulainya kepemimpinan baru PBNU

untuk masa khidmah lima tahun ke depan. Miftachul Akhyar sendiri kembali dipercaya menduduki posisi Rais Aam setelah hasil musyawarah AHWA disahkan dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Bagi NU, penggunaan AHWA bukanlah mekanisme yang sepenuhnya baru. Sistem tersebut memiliki akar sejarah dalam perjalanan organisasi. Salah satu tonggak pentingnya terjadi pada Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 2015 ketika AHWA digunakan untuk memilih Rais Aam. Sebelumnya, Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 juga menjadi momentum penting dalam perjalanan kepemimpinan NU melalui keputusan kembali ke Khittah 1926.

Dalam perkembangan lebih panjang, NU yang berdiri pada 1926 di Surabaya telah melalui berbagai model kepemimpinan dan mekanisme pengambilan keputusan. Perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu berupaya menyesuaikan tata kelola internal dengan kebutuhan zaman, sembari mempertahankan tradisi musyawarah dan peran ulama.

Penggunaan mekanisme AHWA pada Muktamar ke-35 juga memiliki konteks historis yang lebih luas. Di sejumlah organisasi keagamaan dan lembaga keulamaan di berbagai negara, mekanisme konsultasi serta musyawarah elite keagamaan digunakan sebagai cara menjaga kesinambungan kepemimpinan dan menghindari kompetisi terbuka yang berpotensi memecah organisasi. Dalam konteks NU, model tersebut diposisikan sebagai bagian dari tradisi musyawarah yang menempatkan ulama sepuh sebagai rujukan dalam keputusan strategis.

Perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU kali ini sekaligus menunjukkan perbedaan dengan pola pemilihan langsung yang pernah digunakan. Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 2010 menjadi salah satu contoh ketika pemilihan langsung menghasilkan kompetisi terbuka antarkandidat. Perdebatan mengenai dampak model tersebut kemudian ikut mendorong pembahasan mengenai perlunya mekanisme yang dapat meredam rivalitas dalam pemilihan kepemimpinan organisasi.

Muzani berharap kepemimpinan baru PBNU tidak hanya mampu menjaga soliditas internal organisasi, tetapi juga terus berkontribusi terhadap kehidupan kebangsaan. Ia menilai NU mempunyai posisi penting dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama, budaya, dan pandangan sosial.

“Kami berharap organisasi ini akan tetap memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan pembangunan Indonesia, bagi kerukunan, bagi persatuan, bagi persaudaraan, dan bagi harmoni serta kerukunan dalam beragama,” ujar Muzani.

Dengan demikian, isu mengenai duet Gus Kikin-Miftachul Akhyar sebagai paket Istana masih sebatas isu yang beredar dan telah dibantah Muzani. Sementara secara organisatoris, proses pemilihan keduanya berlangsung dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU melalui mekanisme yang telah disepakati peserta muktamar dan dijalankan oleh AHWA.

Kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 selanjutnya menghadapi tantangan untuk menerjemahkan hasil muktamar ke dalam agenda organisasi. Selain menjaga konsolidasi internal, kepemimpinan baru dituntut memperkuat kontribusi NU dalam pembangunan nasional, kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial, serta upaya merawat persatuan dan kerukunan di tengah perubahan masyarakat.(*)

Gubernur Sultra ASR Ingatkan Kejaksanaan, Integritas Jadi Kunci Kepercayaan Publik



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengingatkan jajaran Kejaksaan agar menjadikan integritas, moral, dan amanah sebagai fondasi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pesan itu disampaikan dalam Pengajian Akbar dan Doa Bersama menyambut Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Sabtu malam (29/8/2026).

Menurut Andi, kualitas penegakan hukum tidak cukup hanya ditopang oleh profesionalisme dan kompetensi aparat. Kepercayaan publik juga ditentukan oleh kemampuan aparat menjalankan secara adil, transparan, konsisten, serta berpegang pada nilai moral dan akhlak. Karena itu, peringatan hari lahir Kejaksaan semestinya menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen pengabdian.

"Tugas penegakan hukum merupakan amanah dan tanggung jawab moral yang tidak

hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT," kata Andi. Ia berharap nilai tersebut menjadi pegangan bagi seluruh aparat dalam menghadapi kompleksitas tugas dan tuntutan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pesan tersebut memiliki konteks sejarah panjang. Kejaksaan menempatkan 2 September 1945 sebagai Hari Lahir Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno melantik Mr. R. Gatot Tanoemihardja sebagai Jaksa Agung pertama dalam Kabinet Presidensial, hanya sekitar dua pekan setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Penetapan tersebut berbeda dengan Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap 22 Juli. Tanggal 22 Juli berkaitan dengan momentum ketika Kejaksaan menjadi lembaga yang mandiri dan terpisah dari Departemen Kehakiman pada 1960. Sementara itu, 2 September menandai ke-

lahiran Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Kajati Sultra Dr. Sugeng Riyanta mengatakan Pengajian Akbar di Kendari merupakan bagian dari rangkaian Harlah ke-81 Kejaksaan yang puncak peringatannya jatuh pada 2 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat keimanan, silaturahmi, dan kepedulian sosial melalui penggalangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dana yang dihimpun diarahkan untuk mendukung Gerakan Gotong Royong Rumah Bedah yang dilaksanakan bersama TMA, BAZNAS, dan REI Sultra. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak sekaligus membangun solidaritas sosial. "Nilai kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi masyarakat,"

ujar Sugeng.

Gubernur juga mengapresiasi posisi Kejaksaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan Sultra. Ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar pembangunan berlangsung dalam suasana aman dan berkeadilan. Ia pun menyampaikan harapan agar Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Pengajian kemudian diisi tausiyah Ustaz Dr. KH. Das'ad Latif. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, para bupati dan wali kota se-Sultra, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal dan BUMN, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, Ketua MUI Sultra, Ketua BAZNAS Sultra, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (*)

Gubernur Sultra ASR Ingatkan Kejaksanaan, Integritas Jadi Kunci Kepercayaan Publik



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengingatkan jajaran Kejaksaan agar menjadikan integritas, moral, dan amanah sebagai fondasi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pesan itu disampaikan dalam Pengajian Akbar dan Doa Bersama menyambut Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Sabtu malam (29/8/2026).

Menurut Andi, kualitas penegakan hukum tidak cukup hanya ditopang oleh profesionalisme dan kompetensi aparat. Kepercayaan publik juga ditentukan oleh kemampuan aparat menjalankan kewenangan secara adil, transparan, konsisten, serta berpegang pada nilai moral dan akhlak. Karena itu, peringatan hari lahir Kejaksaan semestinya menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen pengabdian.

"Tugas penegakan hukum merupakan amanah dan tanggung jawab moral yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT," kata Andi. Ia berharap nilai tersebut menjadi pegangan bagi seluruh aparat dalam menghadapi kompleksitas tugas dan tuntutan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pesan tersebut memiliki konteks sejarah panjang. Kejaksaan menempatkan 2 September 1945 sebagai Hari Lahir Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023. Pada tanggal itu, Presiden Soekarno melantik Mr. R. Gatot Tanoemihardja sebagai Jaksa Agung pertama dalam Kabinet Presidensial, hanya sekitar dua pekan setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Penetapan tersebut berbeda dengan Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap 22 Juli. Tanggal 22 Juli berkaitan dengan momentum ketika Kejaksaan menjadi lembaga yang mandiri dan terpisah dari Departemen Kehakiman pada 1960. Sementara itu, 2 September menandai kelahiran Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Kajati Sultra Dr. Sugeng Riyanta mengatakan Pengajian Akbar di Kendari merupakan bagian dari rangkaian Harlah ke-81 Kejaksaan yang puncak peringatannya jatuh pada 2 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat keimanan, silaturahmi, dan kepedulian sosial melalui penggalangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dana yang dihimpun diarahkan untuk mendukung Gerakan Gotong Royong Rumah Bedah yang dilaksanakan bersa-

ma TMA, BAZNAS, dan REI Sultra. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak sekaligus membangun solidaritas sosial. "Nilai kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi masyarakat," ujar Sugeng.

Gubernur juga mengapresiasi posisi Kejaksaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan Sultra. Ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar pembangunan berlangsung dalam suasana aman dan berkeadilan. Ia pun menyampaikan harapan agar Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Pengajian kemudian diisi tausiyah Ustaz Dr. KH. Das'ad Latif. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, para bupati dan wali kota se-Sultra, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal dan BUMN, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, Ketua MUI Sultra, Ketua BAZNAS Sultra, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (*)

Alvin Akawijaya Putra Ikut Jalan santai Bersama Kejari Buton dan Jajaran Forkopimda



Pewarta: La Harman

B U T O N , BP-Hubungan antarlembaga di Kabupaten Buton kembali diperkuat melalui kegiatan nonkedinasan. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti jalan santai dan senam zumba yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Selain menjadi kegiatan olahraga, agenda tersebut dimanfaatkan sebagai ruang membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara pemerintah daerah, Kejaksaan, serta unsur Forkopimda.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Kejari Buton, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran lintas institusi itu memperlihatkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dalam rangkaian peringatan tersebut.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton, kegiatan bersama seperti ini memiliki arti lebih dari sekadar menjaga kebugaran. Interaksi dalam suasana informal dinilai dapat membuka ruang komunikasi yang lebih cair

sehingga koordinasi antarlembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat terus terpelihara.

Bupati Alvin mengapresiasi inisiatif Kejari Buton yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan Forkopimda. Ia menilai kegiatan positif yang mempertemukan jajaran lintas institusi perlu terus didukung karena dapat memperkuat hubungan kerja sekaligus membangun kebersamaan.

“Selain menjaga kesehatan dan kebugaran, kegiatan seperti ini juga mempererat silaturahmi dan sinergi kita. Pemerintah Kabupaten Buton tentu mendukung kegiatan positif yang dapat memperkuat kebersamaan dan hubungan antarlembaga,” ujar Alvin.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur Forkopimda penting untuk memastikan setiap institusi dapat menjalankan kewenangannya secara optimal. Hubungan kelembagaan yang baik juga diperlukan agar koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Kegiatan tersebut diawali dengan jalan santai dan dilanjutkan senam zumba. Para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam suasana akrab, menjadikan olahraga sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kebugaran.

Kepala Kejari Bu-

ton menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI yang dilaksanakan di tiga kabupaten. Selain olahraga bersama, Kejari Buton sebelumnya telah menggelar kegiatan bakti sosial sebagai bagian dari rangkaian peringatan.

Di lingkungan internal, Kejari Buton juga menyelenggarakan Pekan Olahraga yang telah dibuka sebelumnya. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peringatan institusi tidak hanya diarahkan pada agenda seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial dan olahraga.

Secara historis, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam sistem hukum nasional. Lembaga ini secara kelembagaan mengalami perkembangan sejak masa awal kemerdekaan dan terus menyesuaikan peran serta kewenangannya dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Dalam perkembangannya, Kejaksaan menjadi salah satu institusi penting dalam penegakan hukum dan pengawasan kepentingan masyarakat serta negara.

Pada tingkat internasional, kerja sama antarlembaga penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa koordinasi antara institusi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga

publik semakin diperlukan untuk menghadapi persoalan yang kompleks dan lintas sektor.

Konteks tersebut membuat hubungan kelembagaan di tingkat daerah tidak semata berkaitan dengan pelaksanaan tugas formal. Komunikasi, koordinasi, dan pemahaman bersama diperlukan agar setiap institusi tetap berada dalam koridor kewenangannya, tetapi mampu bekerja secara sinergis ketika kepentingan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Alvin berharap hubungan antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kejari Buton, dan Forkopimda terus terjaga. Ia menekankan bahwa sinergi tersebut harus tetap diarahkan pada pelaksanaan tugas masing-masing lembaga serta peningkatan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Harapan kita, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kejaksaan Negeri Buton, dan Forkopimda tetap terjaga. Masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buton,” kata Alvin.

Melalui kegiatan yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Kejaksaan tersebut, jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Buton tidak hanya mendapatkan ruang untuk berolahraga bersama. Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan antarlembaga di Kabupaten Buton. (*)

TP-PKK dan Bhayangkari Buton Tengah Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Kesehatan mental perempuan menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan membangun generasi yang tangguh di Kabupaten Buton Tengah. Pesan itu mengemuka dalam Seminar Kesehatan Mental bertajuk “Mental Sehat, Perempuan Hebat” yang digelar Pengurus Cabang (PC) Bhayangkari Buton Tengah bersama Polwan Polres Buton Tengah di Gedung Kesenian Lakudo, Sabtu (29/8/2026).

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd., yang menghadiri kegiatan tersebut, menilai kesehatan mental tidak semata berkaitan dengan kondisi individu. Menurut dia, kesehatan mental perempuan turut menentukan kualitas pengasuhan, ketahanan keluarga, dan lingkungan tumbuh anak.

“Kesehatan mental menjadi bagian penting dalam membentuk generasi penerus yang tangguh,” kata Umi Noranah dalam kegiatan tersebut.

Ia karena itu mengajak masyarakat memberikan pola asuh yang tepat kepada anak serta membangun lingkungan yang aman. Menurutnya, keluarga yang mampu menciptakan ruang tumbuh yang sehat akan menjadi salah satu fondasi bagi masa depan Buton Tengah.

Perhatian terhadap kesehatan mental perempuan juga memiliki konteks yang lebih luas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam World Mental Health Report 2022 menyebut kebutuhan kesehatan mental di berbagai negara masih tinggi, sementara respons dan layanan yang tersedia belum memadai. WHO mendorong penguatan promosi kesehatan mental, pencegahan gangguan jiwa, perlindungan hak asasi, serta layanan berbasis masyarakat.

Dalam konteks perempuan, persoalan kesehatan mental juga berkaitan dengan berbagai tekanan sosial dan kekerasan. WHO mencatat kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun panjang terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat. Estimasi global terbaru WHO menyebut hampir satu dari tiga perempuan berusia 15 tahun ke atas pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.

Karena itu, seminar di Lakudo tidak hanya menempatkan perempuan sebagai sasaran edukasi kesehatan mental, tetapi juga sebagai bagian penting dari upaya memperkuat keluarga. Pembahasan tersebut sejalan dengan perhatian TP-PKK terhadap isu sosial yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan keluarga.

Umi Noranah juga mengapresiasi peran anggota Bhayangkari yang dinilainya mampu menjalankan peran domestik sekaligus berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia melihat terdapat keselarasan antara 10 Program Pokok PKK dan kiprah Bhayangkari dalam memperkuat keluarga.

“Ada keselarasan visi antara 10 Program Pokok PKK dan kiprah Bhayangkari, terutama dalam menjadikan kelu-

arga sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang berkualitas,” ujarnya.

Menurut Umi Noranah, sinergi kedua organisasi dapat diarahkan pada sejumlah persoalan strategis di Buton Tengah. Beberapa di antaranya pencegahan perkawinan anak, penurunan angka stunting, perlindungan perempuan dan anak, serta pemanfaatan pangan lokal untuk mendukung ketahanan keluarga.

Kolaborasi tersebut menjadi semakin relevan karena persoalan keluarga tidak berdiri sendiri. Kondisi psikologis orang tua, pola pengasuhan, keamanan lingkungan, pemenuhan kebutuhan anak, serta kemampuan keluarga menghadapi tekanan sosial saling berkaitan dalam menentukan kualitas tumbuh kembang generasi.

Seminar itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 dan Hari Jadi Polwan ke-78. Dari sisi sejarah, Bhayangkari didirikan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1949 atas prakarsa Ny. HL. Soekanto bersama Ny. Titi Memet Tanumidjaja dan Ny. KS. Soewondo Pranoto. Sementara itu, tanggal 19 Oktober 1952 kemudian menjadi tonggak penyatuan organisasi istri anggota Polri dalam wadah Bhayangkari, dan pada 1963 tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.

Sementara sejarah Polwan Indonesia bermula pada 1 September 1948 ketika enam siswi mendapat kesempatan mengikuti pendidikan kepolisian di Bukittinggi. Pendidikan tersebut sempat terhenti akibat Agresi Militer Belanda II sebelum dilanjutkan di Sekolah Polisi Negara Sukabumi pada 1950. Keenam calon inspektur polisi wanita itu menyelesaikan pendidikan pada 1 Mei 1951 dan kemudian bertugas di lingkungan kepolisian.

Kegiatan di Gedung Kesenian Lakudo menghadirkan psikolog klinis Rifka Retno Annisa, S.Psi., Psikolog, sebagai narasumber utama. Kehadiran psikolog dalam forum tersebut memberikan ruang edukasi kepada peserta untuk memahami kesehatan mental secara lebih komprehensif sekaligus mengenali pentingnya dukungan sosial dan keluarga.

“Anak-anak perlu mendapatkan pola asuh yang tepat dan lingkungan yang aman agar dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mampu menghadapi tantangan masa depan,” kata Umi Noranah.

Seminar tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Buton Tengah Ny. Ferra Wahyu, Staf Ahli TP-PKK Ny. Kartini Adam Basan, pimpinan Persit KCK, Kepala Dinas Sosial Nurlia Husuni, serta perwakilan DP3A dan organisasi wanita setempat.

Bagi Buton Tengah, penguatan kesehatan mental perempuan sekaligus menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat keluarga. Dengan sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah, kepolisian, dan unsur masyarakat, edukasi mengenai kesehatan mental diharapkan tidak berhenti pada forum seminar, tetapi berlanjut dalam praktik pengasuhan, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga di tingkat masyarakat. (*)

BPOM Percepat Transformasi SDM Berbasis AI untuk Indonesia Emas 2045

Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempercepat pembedaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Transformasi ini dilakukan di tengah keterbatasan jumlah pegawai dan semakin luasnya mandat pengawasan BPOM, sekaligus untuk menyiapkan aparatur yang adaptif menghadapi agenda Indonesia Emas 2045.

Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran empat aplikasi berbasis AI, yakni Mentari AI, KIRA AI, SIMAKIN AI, dan KARFIS, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM di Jakarta pada Selasa (18/8/2026). Rakornas mengusung tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Keempat aplikasi itu dirancang untuk menjawab kebutuhan pengelolaan SDM dari hulu hingga hilir. Mentari AI mengolah data talenta menjadi wawasan strategis untuk menemukan potensi terbaik. KIRA AI digunakan untuk menelusuri regulasi, pedoman, standar operasional prosedur, serta kebijakan internal BPOM.

Sementara itu, SIMAKIN AI diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui manajemen kinerja terintegrasi. Adapun KARFIS digunakan untuk meningkatkan transparansi layanan pengelolaan karier jabatan fungsional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan teknologi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan manusia. AI ditempatkan sebagai instrumen pendukung agar proses pengelolaan SDM lebih objektif, berbasis data, dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih cepat. “Dengan peman-



faatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis sumber daya manusia dengan menggunakan artificial intelligence, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” kata Taruna.

Urgensi transformasi itu terlihat dari kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia dan kebutuhan organisasi. BPOM saat ini memiliki sekitar 6.431 pegawai, sedangkan kebutuhan ideal organisasi mencapai sekitar 10.710 pegawai. Artinya, tingkat ketercukupan SDM baru sekitar 60 persen.

Pada saat yang sama, cakupan pekerjaan BPOM terus meluas. Lembaga tersebut mendapat penugasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BPOM juga mendukung sekitar 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan memperkuat pengawasan terhadap sekitar 4,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perluasan mandat tersebut membuat kebutuhan terhadap kompetensi teknologi, keamanan siber, analisis data, dan AI semakin penting. Kemampuan tersebut dibutuhkan agar pengawasan terhadap obat dan makanan dapat dilakukan lebih cepat, terutama ketika pelanggaran juga bergerak ke ruang digital.

Taruna mencontohkan, sepanjang tahun sebelumnya BPOM mengidentifikasi seki-

tar 1,3 juta tautan daring yang tidak sesuai dengan ketentuan. Besarnya volume temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan konvensional perlu ditopang kemampuan digital dan analitik yang memadai.

“Tantangan itu seperti pada tahun lalu, BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan daring yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau kami tidak punya kemampuan daya tangkal, kemampuan siber, tidak punya kemampuan artificial intelligence dan sebagainya, kita tentu akan kalang kabut,” ujarnya.

Penggunaan AI juga ditempatkan dalam kerangka penerapan sistem merit dan manajemen talenta. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi sistem manajemen talenta BPOM yang telah berjalan sejak 2021. Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip meritokrasi yang digunakan di negara-negara maju.

“Semangatnya adalah orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi orientasinya target, orientasinya hasil,” kata Zudan.

BKN mencatat sekitar 4.026 talenta telah diproses dan 3.972 di antaranya telah disetujui. BPOM menjadi salah satu instansi yang seluruh talenta yang

diajukan memenuhi persyaratan. Dari proses tersebut, 100 persen talenta yang diajukan BPOM dinyatakan disetujui.

Transformasi manajemen SDM BPOM mendapat apresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Ia menilai BPOM memiliki modal kuat untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, salah satunya terlihat dari indeks pelayanan publik BPOM yang mencapai 4,8 dari skala 5.

“BPOM ini punya modal yang sangat kuat untuk bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rini.

Rini mengingatkan bahwa digitalisasi birokrasi tidak boleh sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik. Transformasi harus menghasilkan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, pasti, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, BPOM dinilai perlu terus memperluas akses pelayanan di ruang publik.

Saat ini BPOM telah hadir pada 154 dari 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersedia. Kehadiran petugas BPOM di MPP dinilai memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Rini mendorong perluasan kehadiran BPOM di MPP lainnya.

Transformasi terse-

but juga berlangsung bersamaan dengan penguatan budaya integritas. Dalam Rakornas, Taruna menyerahkan tiga buku seri pustaka kepada Menteri PANRB dalam rangka pencaangan Center of Excellence Budaya Integritas (CoEBI) BPOM. Pada kesempatan yang sama, Zudan memberikan penghargaan kepada Taruna atas pencapaian skor arsip ASN peringkat pertama di lingkungan instansi pemerintah pusat periode semester I 2026.

Secara historis, perkembangan manajemen ASN di Indonesia memang bergerak dari pola administrasi kepegawaian menuju sistem berbasis kompetensi dan kinerja. Penguatan sistem merit memperoleh landasan penting melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai bagian penting dalam pengelolaan ASN.

Perubahan tersebut kemudian semakin terkait dengan agenda transformasi digital pemerintah. Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan AI kini menambah di-

mensi baru karena pengambilan keputusan dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan dukungan teknologi yang semakin canggih.

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara global, penggunaan AI dalam pengelolaan SDM berkembang seiring meningkatnya digitalisasi dunia kerja. Organisasi internasional dan berbagai pemerintahan di sejumlah negara mulai membahas tata kelola AI, transparansi algoritma, perlindungan data, serta kebutuhan memastikan teknologi tidak menghilangkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan terhadap pekerja.

Perkembangan AI memasuki babak penting setelah teknologi generatif semakin dikenal luas sejak 2022. Kemampuan sistem AI dalam mengolah data, menghasilkan informasi, dan membantu pekerjaan administratif kemudian mendorong banyak organisasi menguji pemanfaatannya, termasuk dalam bidang sumber daya manusia. Namun, perkembangan itu sekaligus memunculkan kebutuhan terhadap tata kelola, keamanan data, akuntabilitas, dan pengawasan manusia.

Karena itu, BPOM tidak hanya membahas teknologi dalam Rakornas tersebut. Selama dua hari, forum juga membicarakan kepemimpinan transformatif, penerapan sistem merit, manajemen talenta, kesehatan mental, produktivitas, serta kesiapan kompetensi ASN menghadapi perubahan.

Pada hari pertama, Ignatius Jonan menyampaikan materi mengenai “Transformational Leadership in HR: From Routine to Strategic with Artificial Intelligence”. Pembahasan berikutnya disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen ASN Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fah-

mi Alusi, serta Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Wahyu Firdaus.

Pada hari kedua, perspektif pengelolaan SDM diperluas melalui pembahasan kesehatan mental dan produktivitas. Psikolog dan Pakar Kesehatan Mental Ferlita Sari membahas pengelolaan kesehatan mental SDM lintas generasi dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan.

Sementara itu, Direktur dan Chief Human Resources Officer PT Indosat Tbk Irsyad Sahroni membahas peningkatan dampak fungsi SDM terhadap produktivitas organisasi melalui AI. Vice President Human Capital Services PT Bank Mandiri Tbk Pascal Gerardus Anggriawan memaparkan strategi human capital berbasis AI untuk membangun tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan paparan Sekretaris Utama BPOM mengenai “Transformasi Pengelolaan SDM di BPOM”. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa transformasi SDM tidak cukup hanya dengan membeli atau membangun teknologi, tetapi membutuhkan perubahan cara kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, kompetensi, dan sistem pengambilan keputusan.

Dengan jumlah pegawai yang baru memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan organisasi dan cakupan pengawasan yang semakin luas, BPOM menempatkan AI sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Tantangannya adalah memastikan teknologi tersebut tetap berada dalam kerangka sistem merit, tata kelola yang transparan, perlindungan data, serta keputusan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat transformasi. (*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Rinin Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Polri Ajukan Tambahan Rp66 Triliun di Tengah Pagu Anggaran 2027 Turun



Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun untuk tahun anggaran 2027 setelah memperoleh pagu awal Rp139,19 triliun. Tambahan tersebut dinilai diperlukan untuk menopang berbagai kebutuhan operasional kepolisian yang terdampak penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Usulan itu disampaikan Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9). Dalam forum tersebut, selain meminta tambahan anggaran, Polri juga mengusulkan pergeseran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang.

Pergeseran anggaran tersebut menjadi salah satu opsi yang ditempuh Polri untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasional apabila kebutuhan belanja barang belum dapat dipenuhi melalui tambahan anggaran. Usulan itu sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Pagu Polri untuk 2027 yang ditetapkan sebesar Rp139,19 triliun tercatat turun sekitar Rp6,8 triliun dibandingkan anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, Rp61,11 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp30,93 triliun untuk belanja barang, dan Rp47,14 triliun untuk belanja modal.

Tekanan terbesar akibat penurunan anggaran disebut berada pada pos belanja barang. Sejumlah kebutuhan rutin kepolisian berpotensi terdampak, mulai dari bahan bakar minyak dan pelumas,

listrik, pemeliharaan gedung, alat material khusus, hingga perlengkapan perorangan anggota.

Selain kebutuhan rutin, Polri juga menghadapi sejumlah kewajiban dan kebutuhan baru yang membutuhkan dukungan anggaran. Di antaranya tunggakan anggaran BMP dan listrik, kebutuhan operasional daerah otonomi baru dan satuan kerja baru, rekrutmen serta pendidikan personel.

Kebutuhan anggaran juga berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam menghadapi kondisi darurat dan menjaga keamanan nasional. Polri mencatat kebutuhan untuk penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, serta pengamanan kegiatan dan pejabat VVIP sebagai bagian dari kebutuhan yang harus tetap dijamin.

“Selain itu terdapat tunggakan anggaran BMP dan listrik, kebutuhan operasional apabila kebutuhan belanja barang belum dapat dipenuhi melalui tambahan anggaran. Usulan itu sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Wahyu mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan Polri meminta penguatan kembali alokasi belanja barang. Apabila tambahan anggaran belum dapat dipenuhi, Polri dapat mengajukan pergeseran anggaran dari belanja modal ke belanja barang setelah memperoleh persetujuan DPR RI.

Dalam rapat itu, Polri secara khusus mengusulkan pengalihan Rp3,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kebutuhan bahan bakar dan listrik,

perlengkapan personel, satker baru, pendidikan, pemeliharaan almatsus dan gedung, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana.

“Dalam forum ini, kami mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang,” ujar Wahyu. Ia sekaligus meminta persetujuan Komisi III DPR RI terhadap skema pergeseran tersebut.

Besaran Rp3,6 triliun sempat dikonfirmasi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Safaruddin. Pertanyaan itu muncul setelah Polri memaparkan kebutuhan anggaran dan opsi pergeseran belanja dalam rapat pembahasan anggaran 2027.

“Untuk Polri, pergeseran itu Rp3,6 triliun? Tapi ada usulan tambahan tadi? Hanya pergeseran?” tanya Safaruddin.

Wahyu kemudian menegaskan bahwa usulan Polri tidak berhenti pada pergeseran Rp3,6 triliun. Dalam penutup paparannya, ia menyampaikan adanya permintaan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Safaruddin menyatakan Fraksi PDIP mendukung kedua usulan tersebut. Dukungan itu mencakup pergeseran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang serta penambahan anggaran Rp66 triliun.

“Saya sudah catat di sini. Kalau memang ada usulan tambahan tahun 2027 Rp66 triliun, dan pergeseran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang, kami dari Fraksi PDIP sangat menyetujui pergeseran dan penambahan Rp66 triliun,” ujar Safaruddin.

Pembahasan anggaran tersebut ber-

langsung ketika kebutuhan kepolisian terus berkembang seiring bertambahnya cakupan tugas keamanan dan pelayanan publik. Secara historis, institusi kepolisian Indonesia telah mengalami perubahan kelembagaan sejak awal kemerdekaan. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Badan Kepolisian Negara, kemudian Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pada 29 September 1945.

Tonggak penting berikutnya terjadi pada 1 Juli 1946. Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11/S.D. Tahun 1946, Djawatan Kepolisian Negara menjadi jawatan tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Perjalanan kelembagaan Polri kembali mengalami perubahan besar pada era Reformasi. Sejak 1 April 1999, Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menjadi institusi kepolisian yang mandiri. Dalam sistem saat ini, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan mekanisme pengangkatan yang melibatkan persetujuan DPR.

Perubahan panjang tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan Polri juga mengikuti perkembangan fungsi dan cakupan tugasnya. Pada 2027, kebutuhan tersebut kembali menjadi bagian dari pembahasan antara Polri dan DPR, terutama terkait kecukupan belanja barang, pemeliharaan sarana, pengadaan perlengkapan, pengembangan personel, serta dukungan terhadap tugas pengamanan dan penanggulangan keadaan darurat. (*)

KLH Telusuri 19 Perusahaan yang Diduga Terkait Karhutla di Sumatra-Kalimantan

JAKARTA, BP- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memperketat pengawasan terhadap badan usaha yang konsesinya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 19 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan kini menjalani proses verifikasi setelah pemantauan satelit menunjukkan adanya titik panas di wilayah konsesi mereka.

Dari 19 perusahaan tersebut, 12 berada di Kalimantan, sedangkan tujuh lainnya tersebar di Sumatra. Pemerintah belum menyimpulkan bahwa seluruh badan usaha itu merupakan pihak yang menyebabkan kebakaran karena pemeriksaan lapangan masih berlangsung.

Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH, Irfen Pol Rizal Irawan, mengatakan luas area yang terbakar dalam kasus karhutla yang tengah menjadi perhatian pemerintah mencapai sekitar 11.046,69 hektare. Pemerintah, menurut dia, tidak hanya mengejar aspek pidana, tetapi juga menggunakan instrumen administratif dan perdata.

“Terlepas dari dibakar atau terbakar, ketika di dalam suatu area konsesi terjadi kebakaran, maka melekat padanya strict liability atau pertanggungjawaban mutlak,” kata Rizal dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Senin (31/8).

Prinsip tersebut membuat keberadaan api di dalam konsesi perusahaan menjadi dasar penting bagi KLH untuk meminta pertanggungjawaban lingkungan. Namun, penentuan apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian, faktor alam, atau sengaja dilakukan tetap membutuhkan pembuktian dan verifikasi di lapangan.

Dari hasil pemetaan awal, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah badan usaha yang paling banyak masuk pengawasan. Terdapat tujuh perusahaan di provinsi tersebut dengan total area terbakar mencapai 2.260,08 hektare.

Di Kalimantan Selatan, KLH mencatat tiga perusahaan dengan luas area terbakar secara keseluruhan mencapai 6.595,15 hektare. Sementara itu, dua perusahaan di Kalimantan Tengah memiliki total area terbakar 99,40 hektare, termasuk salah satu perusahaan dengan area terbakar sekitar lima hektare.

Di Sumatra, empat perusahaan di Sumatra Selatan tercatat memiliki total area terbakar 772,72 hektare. Satu perusahaan di Lampung memiliki area terbakar 202,73 hektare, sedangkan satu perusahaan di Riau tercatat memiliki area terbakar sekitar 7,10 hektare.

KLH menyatakan pengawasan terhadap 19 badan usaha tersebut telah dilakukan sejak Januari 2026 hingga akhir Agustus. Langkah yang ditempuh antara lain pemasangan plang pengawasan, penyegelan, serta tindakan lain oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

“Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin sudah menasar 19 badan usaha di tujuh provinsi. Yaitu di Sumatra ada tiga provinsi dan Kalimantan empat provinsi,” ujar Rizal.

Menurut KLH, pemantauan satelit sebelumnya menemukan 42 perusahaan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran di wilayah konsesinya. Dari jumlah tersebut, baru 19 perusahaan yang masuk proses penanganan karena pemeriksaan terhadap kelompok berikutnya masih akan dilakukan oleh tim pengawas.

“Kami memonitor dari satelit yang kami gunakan. Setelah ada hotspot, kemudian kami overlay, ada 42 perusahaan yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran di area konsesinya,” kata Rizal.

Pemerintah kini masih berupaya memastikan hubungan antara kebakaran dan aktivitas perusahaan. Rizal menegaskan, keberadaan lahan terba-

kar di area konsesi tidak otomatis berarti perusahaan membakar lahan tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan antara lahan yang terbakar dan lahan yang sengaja dibakar.

“Dari 19 perusahaan ini kami masih melakukan verifikasi dan pendalaman di lapangan. Yang pasti, di 19 perusahaan ini ada area yang terbakar. Kami akan meneliti apakah lahan tersebut terbakar atau sengaja dibakar,” ujarnya.

Penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan melalui tiga mekanisme. Sanksi administratif menjadi salah satu instrumen awal, sementara sengketa lingkungan hidup atau gugatan perdata dapat ditempuh untuk meminta pemulihan dan pertanggungjawaban kerugian lingkungan. Adapun perkara pidana ditangani penyidik Polri, baik pada tingkat Polda, Polres maupun Mabes Polri.

Kasus terbaru tersebut menambah panjang catatan penanganan karhutla di Indonesia. KLH mencatat sepanjang 2023 hingga 2025 masih terdapat 32 perkara yang belum selesai dengan potensi kerugian lingkungan hidup sekitar Rp5,30 triliun.

“Periode 2023 sampai 2025, perkara yang belum selesai total ada 32 perkara, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,30 triliun,” kata Rizal.

Persoalan karhutla sendiri bukan fenomena baru di Indonesia. ASEAN mencatat kebakaran besar pada 1997-1998 menjadi salah satu episode paling merusak dalam sejarah kawasan. Lebih dari sembilan juta hektare lahan terbakar dan sekitar 6,5 juta hektare di antaranya merupakan kawasan hutan. Kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan saat itu diperkirakan melampaui 9 miliar dollar AS.

Krisis kembali mencapai skala besar pada 2015. Kondisi sangat kering yang dipengaruhi El Niño memicu kebakaran luas di Indonesia pada Agustus-November dan menghasilkan emisi karbon serta polutan dalam jumlah besar. ASEAN mencatat episode tersebut juga berdampak lintas batas ke sejumlah negara Asia Tenggara.

Dampak ekonomi karhutla kembali terlihat pada 2019. Bank Dunia memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran di delapan provinsi Indonesia sepanjang Juni-Oktobre 2019 mencapai sekitar 5,2 miliar dollar AS atau sekitar 0,5 persen produk domestik bruto. Pada Januari-September tahun yang sama, sekitar 620.201 hektare hutan dan lahan tercatat terbakar di delapan provinsi terdampak.

Dampak karhutla juga tidak berhenti di wilayah Indonesia. Pada 2015, kabut asap dari Sumatra dan Kalimantan terbawa angin hingga memengaruhi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand selatan, bahkan sebagian Filipina. Kondisi serupa kembali tercatat dalam episode kebakaran 2019 ketika asap dari Sumatra dan Kalimantan bergerak menuju Malaysia dan Singapura.

Catatan sejarah tersebut menunjukkan bahwa karhutla memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada persoalan kebakaran di satu lokasi. Kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga pencemaran udara lintas negara membuat pengendalian kebakaran menjadi persoalan lingkungan sekaligus kepentingan regional.

Karena itu, langkah KLH menggunakan pemantauan satelit untuk mengidentifikasi wilayah rawan kemudian melakukan pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum. (Al-wan)

Kominfo Baubau Usulkan 2.500 ASN Ikuti Pelatihan AI Google dan ASEAN Foundation



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mengusulkan 2.500 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti program pelatihan penguasaan literasi dan implementasi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang digelar melalui program Google x ASEAN Foundation 2026. Namun, dari jumlah tersebut, Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBLSDM Komdigi) Makassar untuk sementara baru menyetujui kuota 500 peserta.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi digital ASN sekaligus mempersiapkan aparatur menghadapi perubahan pola kerja pemerintahan yang semakin memanfaatkan teknologi AI. Pelatihan akan dilaksanakan pada September 2026 di wilayah kerja BBLSDM Komdigi Makassar, termasuk Kota Baubau.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si. mengatakan, pemerintah daerah masih berharap kuota yang diajukan dapat dipenuhi seluruhnya. Dengan demikian, lebih banyak ASN di lingkungan Pemerintah Kota Baubau dapat memperoleh akses terhadap peningkatan kompetensi digital tersebut.

“Pemkot mengusulkan 2.500 ASN, namun yang disetujui sementara dari BBLSDM Komdigi Makassar baru 500 ASN. Kami berharap usulan tersebut bisa dipenuhi semuanya,” ujar Andi Hamzah dalam siaran persnya, Jumat (28/8/2026).

Koordinasi mengenai pelaksanaan program telah dilakukan Pemkot Baubau bersama BBLSDM Komdigi Makassar pada Jumat (28/8/2026). Sosialisasi dan koor-



dinasi teknis tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom untuk membahas pelaksanaan Program Pelatihan ASEAN Foundation 2026.

Pelatihan tersebut memiliki sasaran utama mencetak 1.500 ASN yang kompeten dan tersertifikasi secara internasional di wilayah kerja BBLSDM Komdigi Makassar. Kota Baubau menjadi salah satu daerah yang diikutsertakan dalam program pengembangan kapasitas aparatur tersebut.

Pelaksanaan pelatihan akan menggunakan sistem kelas paralel. Sebanyak 30 kelas disiapkan dan dibagi ke dalam tiga gelombang atau batch selama September 2026.

Batch pertama dijadwalkan berlangsung pada 7-9 September 2026. Selanjutnya, batch kedua digelar pada 10-12 September 2026, sedangkan batch ketiga berlangsung pada 13-15 September 2026. Masing-masing batch terdiri atas 10 kelas.

Selain memperoleh pengetahuan mengenai literasi dan penerapan AI, peserta juga diarahkan mendapatkan sertifikasi pelatihan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sertifikat tersebut terintegrasi langsung dengan Platform ASN Digital milik Badan Kepegawaian Negara.

Integrasi sertifikat ke dalam platform ASN Digital menjadi salah satu aspek penting dalam program tersebut karena capaian pengembangan kompetensi aparatur dapat terdokumentasi dalam ekosistem digital kepegawaian pemerintah. Dengan me-

kanisme itu, pelatihan tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga tercatat sebagai bagian dari pengembangan kapasitas ASN.

Penguatan kompetensi AI bagi aparatur berlangsung ketika teknologi tersebut berkembang pesat dalam berbagai sektor, termasuk administrasi publik. Secara global, pemanfaatan AI generatif mulai meluas setelah kemunculan layanan berbasis model bahasa dan teknologi generatif yang dapat membantu pengolahan teks, analisis data, pembuatan materi, hingga otomatisasi sejumlah pekerjaan administratif.

Di tingkat internasional, negara-negara anggota ASEAN juga mulai menempatkan keterampilan digital dan tata kelola AI sebagai agenda penting. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami sekaligus menggunakan AI secara bertanggung jawab semakin menjadi bagian dari kompetensi tenaga kerja, termasuk aparatur pemerintahan.

Di Indonesia, agenda transformasi digital pemerintahan juga telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi salah satu landasan nasional dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pemanfaatan AI dalam pelayanan publik dan adminis-

trasi pemerintahan. Teknologi tersebut dipandang dapat membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan, mempercepat pengolahan informasi, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data apabila diterapkan dengan tata kelola yang tepat.

Dalam konteks Kota Baubau, program pelatihan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan ASN menghadapi perubahan tersebut. Aparatur tidak hanya dituntut mampu menggunakan perangkat digital, tetapi juga memahami cara memanfaatkan AI secara efektif, aman, dan sesuai kebutuhan pekerjaan pemerintahan.

Andi Hamzah berharap kerja sama antara BBLSDM Komdigi Makassar dan Pemerintah Kota Baubau terus diperkuat sehingga kesempatan peningkatan kapasitas digital dapat menjangkau lebih banyak aparatur.

“Koordinasi antara BBLSDM Komdigi Makassar dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat, khususnya dalam mempersiapkan ASN Kota Baubau agar mampu memahami dan mengimplementasikan teknologi AI secara optimal,” katanya.

Ia menilai peningkatan kemampuan tersebut penting untuk mendukung kompetensi aparatur sekaligus mempercepat transformasi digital Pemerintah Kota Baubau. Penguasaan AI diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan konkret pemerintahan, mulai dari pengelolaan informasi hingga peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kompetensi digital ASN menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan Kota Baubau di masa depan,” ujar Andi Hamzah.(*)

Kerap Mangkir, Seorang PNS Pemkot Baubau Diusulkan untuk Diberhentikan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mulai menerapkan langkah lebih tegas terhadap aparatur sipil negara yang melanggar disiplin. Seorang PNS dari Kecamatan Sorawolio telah diusulkan untuk diberhentikan setelah hasil evaluasi menunjukkan tingkat kehadirannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkot Baubau. Pemerintah daerah juga akan memanggil dua ASN lainnya dalam waktu dekat untuk menjalani sidang penegakan kode etik dan disiplin guna memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran.

Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., mengatakan setiap ASN memiliki kewajiban menjaga kehadiran, keaktifan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Evaluasi terhadap aspek tersebut akan dilakukan secara berkala oleh pimpinan.

“Yang pasti apabila ada ASN yang bermasalah, Pemkot tidak segan-segan untuk melakukan tindakan sampai pada pemberhentiannya sebagai ASN,” kata La Ode Darus Salam usai apel gabungan ASN lingkup Pemkot Baubau di Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (31/8/2026).

La Ode Darus Salam yang juga

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Baubau meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif mengawasi bawahannya. Pegawai yang kerap tidak masuk kerja atau melakukan pelanggaran disiplin diminta segera dilaporkan agar dapat diproses sesuai ketentuan.

Setiap laporan selanjutnya ditangani melalui Sidang Penegakan Kode Etik dan Disiplin. Proses tersebut melibatkan Sekda, BKPSDM, Inspektorat, serta atasan langsung ASN yang bersangkutan sehingga dugaan pelanggaran dapat diperiksa sebelum keputusan sanksi ditetapkan.

Dua ASN yang segera dipanggil akan dimintai keterangan dalam sidang tersebut. Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin yang memenuhi ketentuan untuk dikenai sanksi berat, Pemkot Baubau akan kembali mengusulkan pemberhentian mereka sebagai ASN.

“Karena itu, saya meminta kerja sama kepala OPD agar melaporkan jika ada ASN yang bermasalah dengan disiplin,” ujar La Ode Darus Salam.

Meski demikian, Pemkot Baubau belum mengungkap identitas PNS yang telah diusulkan untuk diberhentikan maupun dua ASN

yang akan menjalani sidang. Pemerintah daerah menegaskan penanganan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Penegakan disiplin ASN merupakan bagian dari sistem manajemen aparatur di Indonesia. Secara historis, reformasi birokrasi setelah Reformasi 1998 mendorong perubahan pengelolaan aparatur dari pola administrasi kepegawaian menuju sistem yang lebih menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja. Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebelum kerangka ASN diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Secara internasional, penguatan disiplin dan integritas aparatur juga berkembang seiring tuntutan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menempatkan pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif sebagai salah satu sasaran pembangunan global. Dalam konteks daerah, prinsip tersebut menjadi relevan karena kedisiplinan aparatur berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(*)